

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari jutaan unit barang atau jasa beralih tangan dari seseorang pada orang lain. Peralihan itu dapat berupa peralihan kepemilikan, peralihan untuk penikmatan atau peralihan untuk mencapai sesuatu sasaran tertentu. Peralihan-peralihan tersebut dapat terjadi karena suatu kesepakatan penyerahan barang atau penyelenggaraan sesuatu bentuk jasa oleh satu pihak, sehingga untuk itu ia menerima imbalan sejumlah uang yang merupakan nilai ganti barang yang diserahkan atau jasa yang diselenggarakan¹. Pada suatu waktu, setiap orang dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.² Berbagai transaksi barang atau jasa di atas dapat menimbulkan peristiwa lain yang berupa masalah antara pihak tersebut.

Dari uraian di atas yang berkaitan dengan obyek barang atau jasa, terlihat bahwa setidaknya terdapat dua pihak yang saling berhubungan atau bermasalah, yaitu pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa atau pelaku usaha. Kedua, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu atau konsumen. Konsumen dan pengusaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang dan/atau jasa) hasil kegiatan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang

¹ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*,. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hlm.17

² Erman Rajagukguk dan Nurmardjito *et all*, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 33

dibutuhkan. Tetapi kegiatan pengusaha itu akan mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap/atau membeli hasil usahanya.³ Hal tersebut merupakan bentuk adanya saling ketergantungan konsumen dan pelaku usaha (interdependensi), namun pada kenyataannya konsumen lebih tergantung kepada pelaku usaha yang kedudukannya relatif lebih kuat dalam banyak hal, daripada kedudukan konsumen.

“Ketergantungan tersebut makin diperburuk dengan keterbatasan konsumen dalam mengakses sumber informasi mengenai hasil-hasil produksi, tingkat pendidikan yang rendah, pemilikan sumber daya serta kemampuan melakukan negosiasi (*bargaining power*). Keadaan tersebut dengan sendirinya memposisikan konsumen lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dan dalam banyak peristiwa hukum, kelemahan-kelemahan konsumen inilah yang seringkali, langsung atau tidak langsung “dimanfaatkan” pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁴ Mengingat ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dimana pelaku usaha lebih mendominasi pemenuhan kebutuhan konsumen, maka adalah *fair* apabila kita lebih berharap banyak pada pelaku usaha untuk secara aktif merealisasikan tanggung jawabnya kepada konsumen dalam rangka menjalankan aktivitas bisnisnya. Tentu saja tanpa mengabaikan kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha”.⁵

Fakta bahwa konsumen berada pada posisi lemah, telah diakui secara internasional dan dinyatakan di dalam Resolusi Majelis Umum PBB tentang Guidelines for Consumer Protection, yang menyatakan bahwa:⁶

“Taking into account the interests and needs of consumer in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalances in economics terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to non-hazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development and environmental protection”.

³ Nasution, *op.cit.* hlm.18

⁴ J.Widijantoro, Dari Tradisi Hukum “*Caveat Emptor*” Menuju “*Caveat Venditor*”, Makalah disampaikan dalam diskusi ilmiah di FH-UAJY 13 Nopember 1999.hal 1

⁵ *Ibid.*,hal.4

⁶ *United Nation Guidelines for Consumer Protection*

Ketidakseimbangan konsumen dalam berhadapan dengan pelaku usaha dalam hal ini dapat ditunjukkan dalam pemberian ganti rugi oleh penyelenggara jasa parkir di kawasan Malioboro kepada pemilik kendaraan yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir pada saat jam parkir. Pemilik kendaraan tidak memiliki pilihan lain untuk turut menentukan besarnya ganti rugi yang pantas bagi dirinya, ketika pengelola parkir berdalih bahwa besarnya ganti rugi sudah berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Pengelola parkir kawasan Malioboro yang diwadahi dalam suatu paguyuban parkir hanya memberikan ganti rugi 50% dari nilai/harga kendaraan yang hilang di tempat parkir saat jam parkir.

Ganti rugi tersebut di atas merupakan bagian dari tanggungjawab pengelola parkir. Pemilik kendaraan untuk mendapatkan kendaraan yang sejenis harus rela mengeluarkan uang lagi, dan tidak ada pilihan lain baginya selain menerima ganti rugi yang diberikan pengelola parkir dari pada tidak sama sekali, walaupun pemilik kendaraan sebenarnya sadar bahwa ganti rugi yang diberikan pihak pengelola itu tidak sesuai dan tidak setara dengan kendaraannya yang hilang. Pemilik kendaraan “merasa tidak punya kekuatan” untuk menuntut lebih, mengingat ketentuan ganti rugi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak pengelola parkir tersebut.

Bagi konsumen yang tidak tahu akan hak-haknya sebagai konsumen, maka konsumen biasanya hanya menerima dengan terpaksa ketika kendaraan yang dititipkan ternyata hilang dan menerima begitu saja sejumlah ganti rugi yang diberikan pengelola parkir.

Beban tanggung jawab pengelola parkir yang sebagian “dialihkan” kepada konsumen/pemilik kendaraan. Dalam berbagai kegiatan bisnis, pengalihan tanggung jawab ini sering terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk klausula baku ataupun klausula eksonerasi yang telah ditetapkan lebih dulu oleh pelaku usaha dan konsumen tidak memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha dalam menentukan klausula perjanjian yang dibuat.

Ketidakseimbangan kedudukan inilah yang seringkali menyulitkan konsumen untuk berjuang sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. betul bahwa mereka sekarang secara yuridis dijamin hak-haknya, namun siapa yang bisa menjamin bahwa hak-haknya tersebut akan dengan mudah diperolehnya?⁷

Selain itu kondisi sosial ekonomi konsumen adalah miskin, kecuali mereka adalah konsumen mobil mewah, rumah, ataupun peralatan rumah tangga lain yang mahal, daya beli yang “pas-pasan” jelas tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan hukum (melalui Lawyer).⁸

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pasal 19 ayat (2) menyatakan tanggung jawab pelaku usaha :

“ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁷ J.Widjantoro, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Konsumen Indonesia, Makalah disampaikan pada acara perancangan Pedoman Operasional BPSK kota Yogyakarta 2 Agustus 2003 di FH-UAJY, Keadilan Bagi Seluruh Konsumen Indonesia. Hlm.2-3

⁸ Ibid.

Hilangnya kendaraan di tempat parkir saat jam parkir, menunjukkan bahwa konsumen secara nyata telah mengalami kerugian, maka sesuai Pasal 19 UUPK pelaku usaha yang dalam hal ini pengelola parkir harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang pantas bagi konsumen.

Selain itu dalam Pasal 4 UUPK menyebutkan, Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hilangnya kendaraan di tempat parkir saat jam parkir, maka sesuai dengan Pasal 4 UUPK, konsumen berhak atas ganti rugi. Pemberian ganti rugi sebesar 50 % terhadap kendaraan yang hilang di tempat parkir saat jam parkir oleh pengelola parkir di kawasan parkir malioboro, adalah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK dan pemilik kendaraan tidak mendapatkan haknya secara penuh dan utuh untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana di maksud pada Pasal 19 ayat (2) UUPK. Tetapi di sisi lain tindakan-tindakan yang merugikan konsumen tersebut justru mendapat legitimasi hukum yang tertuang dalam Pasal 17

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, disebutkan:

“Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau kelengkapannya pada saat jam parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, yang disebabkan karena kelalaian juru parkir, maka Juru Parkir bertanggung jawab untuk mengganti 50% (lima puluh persen) kerugian tersebut “.

Walaupun sudah berlaku UUPK untuk melindungi kepentingan konsumen, tetapi pada prakteknya para pelaku usaha masih banyak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen atau melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Pelanggaran terhadap UUPK ini makin “mudah” dilakukan jika konsumen hanyalah seorang yang daya tawarnya sangat rendah, entah karena kemampuan ekonominya yang sangat rendah, tingkat pendidikannya yang sangat rendah, ataupun karena kesadaran hukumnya yang sangat rendah seperti masyarakat pada umumnya. Kelompok masyarakat seperti inilah yang banyak menjadi korban pelanggaran atas hak-haknya sebagai konsumen, karena kelompok inilah yang paling mudah untuk ditipu dan dilanggar haknya. Kelompok konsumen ini hampir tidak memiliki “kekuatan” untuk membela / memperjuangkan hak dan kepentingannya mengingat berbagai kelemahan-kelemahan yang ada pada konsumen serta ketidak seimbangannya dalam berhadapan dengan pelaku usaha, maka segala kemungkinan bentuk ketidakadilanpun selalu dapat terjadi pada konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan peristiwa hukum yang diuraikan dalam latar belakang maka timbul suatu permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Malioboro terhadap konsumen parkir berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah upaya yang harus ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dari pengelola parkir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dan berkembang terus di masyarakat seperti telah diuraikan di atas, maka penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen jasa parkir di kawasan Malioboro.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang harus ditempuh oleh konsumen jasa parkir dalam memperoleh ganti rugi

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan:

1. dapat memberikan manfaat bagi konsumen/pengguna jasa parkir, sehingga dapat mengetahui hak-haknya sebagai konsumen
2. dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya bagi penyelenggara jasa parkir di kawasan malioboro agar lebih memperhatikan hak-hak konsumen

3. dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Perlindungan Konsumen untuk menambah pengetahuan dan wawasannya
4. dapat memberikan dan menambah sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa permasalahan hukum yang diteliti sepanjang sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain, apabila sudah pernah diteliti maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap penulisan dari penulisan hukum yang sudah ada.

F. Batasan Konsep

Untuk mencegah agar penulisan hukum ini tidak melebar dan tetap berfokus pada permasalahan hukum yang diteliti, maka penulis memberikan batasan-batasan konsep sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab yaitu “ keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).”⁹
- b. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.1139)

- c. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹⁰. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (2) UUPK.
- d. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPK.
- e. Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (5) UUPK.
- f. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (3) UUPK.
- g. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini diatur dalam Pasal 1 huruf (f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

¹⁰ Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm.2

- h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 1 huruf (g) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- i. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi Tempat Khusus Parkir, tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 1 huruf (h) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- j. Ganti rugi adalah penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer yang diperlukan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di lokasi penelitian.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan ataupun narasumber tentang permasalahan hukum yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku pustaka, majalah-majalah, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara, kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden

ataupun narasumber yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, untuk kemudian dijawab baik oleh responden dan/atau narasumber dengan cara memilih jawaban-jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Sedangkan wawancara dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya oleh peneliti, dengan tujuan mengarahkan penggalan data secara langsung dan mendalam terhadap responden dan/atau narasumber sehingga diperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kawasan Parkir Malioboro, karena intensitas pemakaian layanan jasa parkir sangat padat dan di lokasi tersebut selama tahun 2006 telah terjadi kehilangan kendaraan sebanyak 4 kali, maka berdasarkan hal tersebut penulis memilih lokasi parkir di Kawasan Malioboro.

5. Populasi dan metode penentuan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau bagian-bagian yang menjadi pengamatan penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Adapun populasi dalam penelitian hukum ini meliputi seluruh pengelola parkir dan seluruh konsumen jasa parkir yang berada di kawasan Malioboro.

b. Metode penentuan sampel

Metode penelitian ini menggunakan *non random sampling*, yaitu metode dimana tidak semua bagian-bagian dari populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian. Bentuk *non random sampling* yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu dengan berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan obyek yang diteliti dan secara kualitas dapat mewakili obyek penelitian. Ciri-ciri yang dimaksud adalah pengelola parkir yang karena kelalaiannya pernah menyebabkan terjadinya kehilangan kendaraan yang diparkir di tempat parkir saat jam parkir.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Responden dalam penelitian hukum ini adalah :

- Bpk. Rohadi, koordinator lapangan paguyuban parkir Malioboro
- Bpk. Suminto, juru parkir Pasar Bringharjo
- Ibu Hesti Indrawati, pemilik kendaraan yang pernah kehilangan kendaraan di tempat parkir Pasar Bringharjo.
- 40 orang responden konsumen jasa parkir
- 20 orang responden juru parkir

b. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi informasi atau mengetahui secara jelas mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bpk. Nanang Ismuhartoyo selaku ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY),
2. Bpk. G. Widiartana selaku anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta,
3. Bpk. Moeljatno selaku Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota

7. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, artinya bahwa data-data yang diperoleh peneliti dari responden ataupun narasumber kemudian dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian hukum ini adalah metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif merupakan pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mengetahui gambaran mengenai isi dan hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum ini, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menguraikan fenomena yang secara riil terjadi dimasyarakat, dalam hal ini masyarakat konsumen jasa parkir di kawasan Malioboro, yang kemudian berdasarkan fenomena yang secara riil terjadi di masyarakat dapat dirumuskan suatu permasalahan-permasalahan hukum. Selain itu pada bab ini juga terdapat tujuan, manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan secara umum mengenai Perlindungan Konsumen, tinjauan umum penyelenggaraan perparkiran di kawasan Malioboro.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan masalah, serta saran untuk pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.